

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan kewarganegaraan *Civic Education* telah di tanamkan sejak di Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Undang-undang No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan *Civic Education* sebagai sesuatu yang wajib dalam kurikulum pendidikan nasional dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan atas Pasal 37). Maksud dan tujuan PKn tersebut selaras dengan Grand desain Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup tiga aspek, yakni *Civic Knowledge Pengetahuan* kewarganegaraa, *Civic Skill* ketrampilan, dan *Civic Dispotition* Sikap. Dimana ketiga komponen tersebut untuk membentuk *Smart and Good Cicitzen* warga negara yang cerdas dan baik (Winarno, 2013, hlm. 26).

Kemudian lebih diperjelas lagi, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter *character building* bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warganegara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab (A. Ubaedillah 2015, hlm. 9).

Walaupun adanya Pendidikan kewarganegaraan lebih berorientasi pada sisi kewarganegaraan dalam konteks pemahaman dan pengamalan hakikat kewarganegaraan yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Akan tetapi, PKn juga tidak menghilangkan orientasi pada hakikat kepribadian warganegara dalam dimensi moral dan etika, hanya saja penekanan mengenai moral dan etika dalam nilai-nilai luhur bangsa dianggap tidak begitu kentara menonjol dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pasca berganti

nomenklatur dari Pendidikan Moral Pancasila ke Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan fokus pendidikan moral terpisah dari kesatuan Pendidikan Kewarganegaraan. Apalagi kurikulum di Sekolah Dasar telah menghilangkan substansi pembelajaran budi pekerti. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya mata pelajaran budi pekerti di jenjang Sekolah Dasar. Yang ada, hanya terdapat di jenjang Sekolah Menengah Pertama, itupun dalam kurikulum 2013 terintegrasi bersama mata pelajaran Pendidikan Agama. Sehingga acuan moral dan etika lebih kentara dalam balutan religius, dan itu pun tidaklah salah.

Integrasi Pendidikan budi pekerti yang menyangkut pemahaman serta pengamalan moral dan etika dalam kesatuan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, agaknya didasarkan pada penguatan karakter kepribadian siswa yang religius. Dalam hal ini, integrasi dianggap efektif apabila proses pengajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti menghasilkan generasi muda (siswa) yang memiliki mental, psikologis dan perilaku yang bermoral, beretika dan religius. Untuk itu, kehadiran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, begitu pula dengan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dimaksudkan sebagai upaya menjaga siswa dari penyimpangan moral dan norma agama dalam bentuk berbagai perilaku negatif, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Dengan demikian, Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan muatan religius amatlah diperlukan dalam dunia pendidikan kita.

Bahkan dalam tataran pengamalan, Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis karakter religius dipandang sangat urgen diterapkan dalam model dan praktik Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena masalah Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadian baik sebagai warganegara maupun sebagai individu.

Upaya-upaya menumbuhkembangkan karakter kepribadian generasi muda dalam konteks nilai-nilai luhur budaya bangsa serta nilai-nilai religius,

dikuatkan dengan program pemerintah, dimana Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional. Ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter ini meliputi: a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas: 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal; 2. PPK pada Nonformal; 3. PPK pada Informal, b. pelaksana dan c. pendanaan.

Hamka yang menyatakan bahwa karakter merupakan watak atau sifat yang ada pada diri setiap manusia. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Victor Battistich, menyatakan bahwa Karakter *character* mengarah pada serangkaian sikap *attitudes*, perilaku *behaviours*, motivasi *motivations*, dan keterampilan *skills*. Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti berpikir kritis, perilaku seperti jujur dan bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya (Rohmat, 2017, hlm. 81).

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan integrasi dan basis nilai karakter bukan hanya milik generasi, siswa yang secara normal pada umumnya dalam kondisi memiliki keluarga yang lengkap, dalam taraf ekonomi mencukupi, serta dalam kondisi psikologis yang stabil. Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter juga sama penting bagi anak-anak terlantar, bahkan bagi anak-anak terlantar urgensinya pada taraf lebih penting dan mendesak. Karena anak-anak terlantar yang jauh dari kasih sayang sebagai akibat tidak berfungsinya lingkungan keluarga dalam kehidupan mereka yang disebabkan faktor keadaan ataupun faktor kesengajaan orang tua, sehingga mereka tidak mendapatkan

perlindungan dan pengawasan keluarga secara memadai, umumnya lebih potensial mengalami kondisi psikologis dan berperilaku negatif.

Beberapa waktu lalu dunia pendidikan kita tercoreng oleh kelakuan peserta didik yang memperlihatkan sikap tidak baik dan sangat bertolak belakang dengan moral maupun etika, yaitu peristiwa salah satu siswa SMP PGRI Wringinanom Gresik, memukul dan mempersekusi gurunya lantaran sang murid tidak terima ditegur merokok di dalam kelas. (<http://jatim.tribunnews.com/2019/02/10/viral-video-murid-aniaya-guru-di-gresik-penyebabnya-tak-terima-ditegur-saat-merokok-di-kelas>). Figur guru sebagai sosok pendidik yang patut dihargai, diperlakukan dengan tidak hormat. Sikap seperti itu jelas telah menunjukkan buruknya kualitas moral peserta didik.

Kemudian pada kasus lain, ada bentuk distorsi kepribadian yang mewujud dalam tindak kekerasan, seperti pada peristiwa ; Lantaran diduga tersinggung atas status di media sosial (Medsos), Suwandy (14) pelajar SMP di Palembang, Sumatera Selatan, dikeroyok temannya sendiri hingga korban mengalami luka di lengan usai dipukul menggunakan botol (<https://regional.kompas.com/read/2018/09/21/19204871/gara-gara-status-di-facebook-pelajar-smp-dikeroyok-teman-sendiri>). Jelaslah dua kasus yang telah dipaparkan tersebut, menunjukkan bagaimana perilaku peserta didik telah terkontaminasi dengan hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan citra pelajar yang sarat dengan intelektualitas dan beradab.

Beberapa kasus yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, selama ini disinyalir akibat dari buruknya kualitas pendidikan kita. Bobot pengajaran mengenai pendidikan moral boleh dikatakan tidak cukup memadai sehingga menyebabkan melemahnya tata krama sosial dan etika moral dalam kehidupan di lingkungan sekolah khususnya. Hal tersebut berdampak semakin banyak penyimpangan norma Susila dan norma agama yang termanifestasi dalam bentuk kenakalan siswa di sekolah. Kurangnya penghormatan murid terhadap guru, kurangnya disiplin dan ketaatan terhadap aturan sekolah, mudahnya terjadi persekusi, perundungan serta tindak kekerasan,

hingga perbuatan asusila di kalangan siswa di lingkungan sekolah adalah eksekutif negatif dari lemahnya proses dan hasil pendidikan moral di sekolah.

Bukan hanya mengenai kenakalan siswa yang lebih mengarah pada tindak kekerasan saja yang menjadi kekhawatiran akan kualitas pendidikan bangsa ini, selain itu permasalahan menipisnya nasionalisme kewarganegaraan siswa-siswa di sekolah saat ini sungguh mengkhawatirkan. Siswa-siswa di sekolah lebih mengenal tokoh super hero Hollywood ataupun artis musik internasional daripada tokoh pahlawan bangsa. Mereka lebih hafal lirik lagu pop Korea dibanding lagu-lagu kebangsaan yang sarat nilai nasionalisme dan patriotisme, apalagi pada lagu daerah mereka sendiri, sangat sedikit yang menggemari kalau bukan mereka yang ikut ekstra kurikuler muatan lokal semacam seni musik Karawitan. Mirisnya lagi, siswa-siswa lebih bangga memajang foto ataupun poster artis-artis Barat yang jauh dari nilai-nilai ketimuran bangsa kita, dibanding foto atau poster tokoh pahlawan bangsa.

Apa yang disinggung di atas tersebut, adalah realitas yang terjadi dewasa ini yang menjadikan kita prihatin terhadap kondisi remaja khususnya siswa sekolah, dan umumnya generasi muda bangsa ini. Padahal, generasi muda adalah cikal bakal penerus bangsa. Jika kualitas generasi muda kita mengalami kemunduran, seperti pada beberapa fenomena yang telah disinggung di atas, maka bagaimana nasib bangsa ini ke depannya? Kita tentu tidak ingin generasi muda penerus bangsa terus mengalami kemunduran dalam aspek mental, psikologis, moral dan perilakunya.

Upaya untuk membentuk kualitas generasi muda yang nasionalis, patriotik dan sesuai dengan kepribadian bangsa sesungguhnya telah ada dalam bentuk pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dimana PKn dalam berbagai konteks, yakni sebagai media pembelajaran pada pendidikan formal (di sekolah dan di perguruan tinggi), nonformal (pendidikan di luar sekolah), dan informal (pergaulan di rumah dan masyarakat) mempunyai visi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial-kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap dan keterampilan kewarganegaraan dalam diri warganegara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan dalam berbagai konteks (Winataputra, 2015

hlm.410). Kemudian konsepsi PKn, juga dikuatkan dengan tujuan keberadaan PKn sebagaimana termaktub dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Kecenderungan anak terlantar masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah dan berperilaku patologis, seperti merokok, mabuk-mabukan, memalak, judi, pornografi dan kadang terlibat pula dalam tindakan kriminal kecil-kecilan lebih besar ketimbang anak-anak yang berada dalam pengasuhan dan pengawasan orang tua serta keluarga yang relatif utuh dan stabil. Pengaruh *peer-group* yang salah juga menjadi faktor tambahan yang tak jarang menyebabkan tumbuh kembang anak-anak terlantar diwarnai preferensi yang keliru tentang sikap dan perilaku mereka sehari-hari di rumah. Apalagi yang sangat mendesak pada anak terlantar yang secara ekonomi berada jauh dari taraf sejahtera.

Walaupun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian pada pasal 2 disebutkan “Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Tetapi realitasnya, banyak anak terlantar yang tidak tersentuh pemerintah. Survei BPS Jawa Barat tahun 2016 menemukan bahwa jumlah anak telantar di Jawa Barat 135.787 orang. Di Kota Cimahi sendiri terdapat 670 Orang anak terlantar antara usia 5-17 tahun (BPS Jabar, 2017).

Banyaknya anak terlantar yang tak terakomodasi oleh fasilitas pemerintah daerah disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, serta rasio ketidakseimbangan jumlah tempat penampungan dengan jumlah anak terlantar dan fakir miskin. Dari hal inilah, permasalahan anak terlantar tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga dibutuhkan kontribusi seluruh pihak, dan peran swasta dalam penanganan dan pembinaan anak-anak terlantar juga dibutuhkan. Dengan adanya peran swasta dalam bentuk keberadaan lembaga sosial seperti panti asuhan adalah

salah satu upaya positif dalam menangani permasalahan anak terlantar yang layak mendapatkan dukungan semua pihak.

Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Depsos RI (2004, hlm. 4), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Peran panti asuhan sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan bagi anak terlantar untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka tidak dapat dianggap remeh. Keberadaan panti sosial bagi anak-anak terlantar setidaknya dapat menggantikan fungsi keluarga dalam melindungi, memenuhi kebutuhan dan memberikan pendidikan yang layak, termasuk di dalamnya terdapat Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter yang ditanamkan baik secara formal maupun nonformal. Fungsi perlindungan serta pemenuhan kebutuhan ada pada fasilitas asrama, dan fungsi pendidikan ada pada bentuk pendidikan baik formal seperti Sekolah Dasar atau Sekolah Lanjutan, maupun nonformal seperti kelompok belajar. Fungsi pemenuhan hak anak terlantar melalui ketiga bentuk fasilitas itulah yang dinilai cukup representatif dalam menanamkan karakter kepribadian anak-anak sesuai karakter bangsa dalam kesehariannya.

Ketiga fungsi pemenuhan hak anak terlantar tersebut di atas, juga terdapat pada Panti Asuhan Terpadu Ulul Azmi, yang secara kelembagaan berada di naungan Yayasan Sosial Ulul Azmi. Lembaga sosial yang berdomisili di Jalan Cimekar No. 14A Rt.01/29 Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ini selain panti asuhan anak, juga memiliki program dan fasilitas sosial lain di antaranya; Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan SMP IT Boarding School

Ulul Azmi. Dalam konteks religius, Lembaga Sosial Ulul Azmi menerapkan konsep pendidikan yang terintegrasi dengan memasukkan penanaman karakter religius. Diantaranya kegiatan pesantren Tahfidz Al-Qur'an dan sekolah umum *boarding school* dari tingkat Taman knak-kanak sampai dengan sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP). Dengan visi misi membentuk generasi yang religius, berakhlak mulia, taat pada hukum agama dan negara inilah format Pendidikan formal dan nonformal di Lembaga Sosial Ulul Azmi sangat layak mendapatkan perhatian dan dukungan, baik dukungan materiil maupun nonmateril. Karena di Lembaga Sosial Kesejahteraan Anak Ulul Azmi terdapat institusi pendidikan formal dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga SMP, serta pendidikan nonformal lainnya, yang di dalamnya tercakup kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang terintegrasi dengan lingkungan, model dan gaya pendidikan kental dengan nilai karakter religius sehingga keberadaannya menarik minat peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai karakter religius, yang kemudian peneliti tuangkan dalam penelitian berjudul **“Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Karakter Religius (Studi Kasus LKSA SMP Islam Terpadu Ulul Azmi Boarding School Cimahi)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Adanya disfungsi peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam pengasuhan anak
2. Belum maksimalnya bobot Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pengajaran di sebagian besar institusi pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama, baik dalam aspek teori maupun praktik
3. Belum sinergisnya antara pemahaman dan pengamalan dalam hal pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai karakter religius dalam konteks sasaran menjadikan siswa/anak asuh sebagai insan yang memahami hakikat warganegara yang baik dan religius.

4. Belum konsistennya penerapan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai karakter religius yang berkelanjutan

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai karakter religius di SMP IT Ulul Azmi *Boarding School*?
2. Bagaimana relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam mendukung nilai karakter religius di SMP IT Ulul Azmi *Boarding School*?
3. Bagaimana sarana prasarana sumber media evaluasi dalam mendukung nilai karakter religius di SMP IT Ulul Azmi *Boarding School*?
4. Kendala dan upaya apa dalam mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai karakter religius di SMP IT Ulul Azmi *Boarding School*?

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, untuk menentukan fokus penelitian, maka peneliti melakukan pembatasan antara lain:

1. Hanya meneliti bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan diterapkan dalam konteks *good and smart citizen* (warganegara yang cerdas dan baik) dengan perspektif variabel: *Civic Knowledge* (Pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skill* (Keterampilan Kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (Sikap Kewarganegaraan) berbasis nilai-nilai karakter religius dalam Islam.
2. Subjek yang diteliti dibatasi di lingkungan SMP IT Ulul Azmi *Boarding School*. Subjek-subjek yang akan diteliti meliputi : siswa-siswi, tenaga pendidik, dan segenap orang yang terlibat dalam operasional SMP IT *Boarding School* Ulul Azmi. Hal tersebut hasil pertimbangan peneliti, karena kesemua subjek penelitian dianggap representatif sebagai subjek penelitian dalam meneliti Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai karakter religius.

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai karakter religious di SMP IT Ulul Azmi Boarding School.
2. Menganalisis sejauh relevansi pembelajaran nilai karakter religious dalam mendukung Pendidikan Kewarganegaraan di SMP IT Ulul Azmi *Boarding School*?
3. Menganalisis sumber media evaluasi dalam mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai karakter religious di SMP IT Ulul Azmi Boarding School?
4. Menganalisis kendala dan upaya apa saja dalam mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai karakter religious di SMP IT Ulul Azmi *Boarding School*?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai karakter religious. Selain itu, dengan intensifnya berinteraksi di lingkungan Lembaga Sosial, dapat menambah rasa empati kepada anak-anak yang kurang beruntung, sehingga termotivasi untuk lebih bersyukur dan bertekad untuk meningkatkan rasa empati dalam bentuk kontribusi nyata baik secara moral, materiil, tenaga maupun pemikiran.
2. Secara teoretis hasil penelitian dapat memperkaya pengetahuan, wawasan, dan dapat dijadikan referensi bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam keterkaitan dengan nilai karakter religious. Serta dapat menambah referensi peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa maupun dalam pengembangannya.
3. Secara sosial, penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi dan situasi di lingkungan Lembaga Sosial Ulul Azmi, khususnya SMP IT Ulul Azmi *Boarding School* sehingga dapat turut menggugah empati masyarakat umum secara keseluruhan agar lebih berempati dan

- berpartisipasi memberikan dukungan moril maupun materil kepada anak-anak yang kurang beruntung di lingkungan Lembaga Sosial Ulul Azmi.
4. Untuk lingkungan internal, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih konsep, gagasan, ide dan pemikiran bagi lembaga sosial ulul azmi, khususnya SMP IT Ulul Azmi *Boarding School* dalam mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan yang terintegrasi dan berbasis nilai karakter religius, sehingga mencetak banyak insan-insan dengan kualitas intelektualitas yang memadai dan dilengkapi dengan kualitas religius yang mumpuni.

G. Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, merupakan alasan rasional yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Isi dari bab ini meliputi; a) Latar Belakang Penelitian, b) Identifikasi Masalah, c) Perumusan Masalah, d) Pembatasan Masalah; e) Tujuan Penelitian, f) Manfaat Penelitian dan e) Struktur Organisasi Tesis.
- Bab II Kajian Pustaka, mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan gambaran berbagai konsep, generalisasi dan teori yang digunakan dalam penelitian. Isi dari bab ini meliputi; a) Teori tentang Pendidikan Kewarganegaraan, b) Teori tentang pendidikan karakter, c) Teori tentang Nilai Karakter Religius; d) kajian tentang nilai karakter religius; d) Penelitian Dahulu yang lebih relevan tentang pendidikan kewarganegaraan; e) Kerangka Pemikiran.
- Bab III Metodologi Penelitian, merupakan penjabaran secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Isi dari bab ini meliputi; a) Desain Penelitian; b) Tempat Penelitian dan Partisipan; c) Definisi operasional; d) Instrumen penelitian; e) Teknik pengumpulan data; f) Teknik Analisis Data; g) Validitas Data; dan h) Isu Etik.
- Bab IV Temuan dan Pembahasan, merupakan gambaran data yang diperoleh di lapangan untuk kemudian di analisis menggunakan berbagai teori

yang relevan. Isi dari bab ini meliputi; a) Gambaran umum lokasi penelitian, b) Deskripsi hasil penelitian dan c) Analisis hasil penelitian.

Bab V Simpulan, saran merupakan jawaban dari aspek yang di teliti.